



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh : -----

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kotamobagu, tempat kediaman di RT 08 Lingkungan II, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 07/SK.Kh/2018/PA.Ktg tanggal 5 Februari 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg tanggal 22 Januari 2018, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXX  
XXXXXXXXXXXXX  
Tanggal Lahir : 11 Desember 2002 (15 tahun 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Berdomisili Lingkungan V, RT.010/RW.005,  
Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur,  
Kota Kotamobagu;

dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX  
XXXXXXXXXXXXX  
Tanggal Lahir : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Lingkungan VI, RT.16 Kelurahan Matali,  
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota  
Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;  
-----
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur akan tetapi KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagai mana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.23.10.01/Kua.01/I/I/2018 tanggal 02 Januari 2018;  
-----
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;  
-----

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan,  
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, Cq. Majelis  
Hakim memberikan Dispensasi Kawin kepada anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa  
dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya  
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **xxxxxx  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah  
dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang  
menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon  
mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada  
pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny  
telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam,  
pekerjaan tidak ada, Berdomisili Lingkungan V, RT.010/RW.005, Kelurahan  
Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah menyetujui niat tersebut;-----

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berpacaran sekitar 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan sebagai akibat dari hubungan tersebut anak Pemohon mengandung dan telah melahirkan pada bulan November 2017;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya;-----
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab,darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT.16 Kelurahan  
Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah memberikan  
keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah;-----
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon dan berniat ingin menikahnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon melalui Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui niat calon suami anak Pemohon untuk menikahi anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anak  
Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam,

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT.16 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berencana akan menikahi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar saya dan anak saya telah datang melamar XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan lamaran tersebut telah diterima oleh ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah,nasab atau sesusuan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5169/I/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel Pos, telah cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174031207084533 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berstempel Pos, telah cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : Kk.23.10.01/Ku.01/I/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar permohonanya tersebut dikabulkan;-----

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Pemohon dan anak Pemohon serta usia anak Pemohon yang belum cakap dalam bertindak secara hukum;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana masing-masing bukti tersebut saling berkaitan dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dan didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1,

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2002 adalah anak perempuan dari XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam bukti P.2 tersebut Pemohon adalah ayah kandung sedangkan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dengan demikian baik bukti P.1 maupun bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 11 Desember 2002 dan Pemohon adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 1 bulan sehingga belum cukup umur untuk bertindak hukum maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon terbukti sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan demikian, maka Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diperoleh keterangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon hamil, bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah dan sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil bahkan anak Pemohon telah melahirkan,

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon,  
bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui  
dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 2002;  
-----
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;  
-----
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, darah atau sesusuan;  
-----
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama sepakat untuk menikah;  
-----
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan telah melahirkan;  
-----
6. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut maka orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun melainkan baru berusia 15

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan, dimana ketentuan Undang-Undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat Undang-Undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat Undang-Undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia tersebut, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak Pemohon (XxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa dan terlebih lagi keduanya telah sama-sama sepakat untuk segera menikah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil bahkan anak Pemohon telah melahirkan, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan suami isteri, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan lebih terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina yang berkepanjangan, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut: -----

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



## دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَخْصَى الْمَثَلُ الْأَوَّلِيُّ الْمُجْتَمِعُ  
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَخْصَى الْمَثَلُ الْأَوَّلِيُّ الْمُجْتَمِعُ  
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَخْصَى الْمَثَلُ الْأَوَّلِيُّ الْمُجْتَمِعُ  
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَخْصَى الْمَثَلُ الْأَوَّلِيُّ الْمُجْتَمِعُ  
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَخْصَى الْمَثَلُ الْأَوَّلِيُّ الْمُجْتَمِعُ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال  
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر  
الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه  
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya";

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;  
-----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);  
-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon;-----

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

Hakim Anggota II

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.HI.**

**Maskuri, S.Ag., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	65.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	156.00

0

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 7/Pdt.P/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)